

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI**

**Oleh : Sagumany dan Chica Desianti**

**ABSTRACT**

*There are still results of regional financial report audits that have a disclaimer and fair opinion with exceptions indicating that the quality of the financial statements of the area still requires continuous improvement. Quality financial reports according to Government Regulation Number 71 of 2010 are financial statements that have relevant, reliable, comparable and understandable characteristics, so that they can provide useful information for their users.*

*This study aims to determine the effect of the application of Government Accounting Standards and the Internal Control System on the Quality of Financial Statements of the Regional Government of Bekasi City. The study was conducted at the Regional Government of Bekasi City through 37 SKPD. The collected data was analyzed by multiple regression analysis.*

*Based on the results of hypothesis testing using SPSS V 24.0 the t test device shows that the application of government accounting standards partially has a significant effect on the quality of financial statements, in other words  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted. Testing the hypothesis with the t-test device shows that the internal control system partially has a significant effect on the quality of financial statements, in other words  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted. Simultaneously the application of government accounting standards and internal control systems has a significant effect on the quality of the financial statements of the Regional Government of Bekasi City. In other words,  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted*

**Keywords:** *Implementation of Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Quality of Local Government Financial Reports, Regional Government of Bekasi City*

## 1. PENDAHULUAN

Reformasi keuangan pemerintah yang dilaksanakan pada awal tahun 2000 berdampak meningkatnya tuntutan masyarakat akan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Paradigma baru tersebut mewajibkan setiap satuan kerja termasuk pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan kepada publik dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas. Pemerintah Daerah berkewajiban menyajikan laporan keuangan yang berkualitas terkait dengan tugas untuk menegakan akuntabilitas khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan sistem pengendalian intern (SPI). Standar akuntansi pemerintahan harus dijadikan acuan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga dengan dilakukannya sistem pengendalian intern yang bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami, sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunaannya. Relevan yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan dengan

laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami dalam artian dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. (PP 71, Tahun 2010).

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Penerapan SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan LKPD (PP Nomor 71 Tahun 2010) yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD di Indonesia. Penerapan sistem akuntansi pemerintahan suatu negara akan sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Negara Indonesia telah menetapkan standar akuntansi pemerintahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun. Adapun pengertian standar akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yaitu “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern (SPI). SPI perlu diterapkan secara optimal untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan yang disengaja ataupun tidak disengaja, seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan dan salah kelola yang dilakukan oleh pengelola keuangan pemerintah dalam proses penyusunan laporan keuangan. SPI bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern merupakan aspek penting yang menunjang terselenggaranya penyajian laporan keuangan

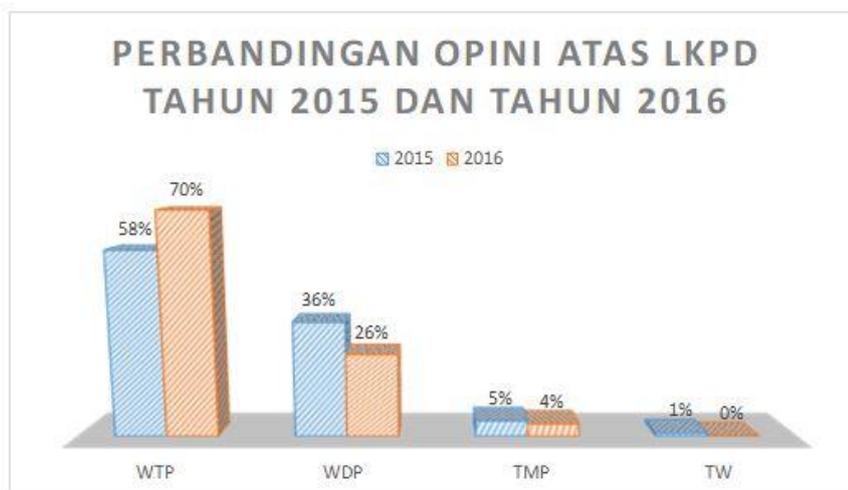
yang berkualitas. Karena laporan keuangan pemerintah yang disajikan harus sesuai dengan SAP. Sedangkan sistem pengendalian intern yang baik dalam lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian hingga pemantauan akan mendukung fungsi keuangan pada pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Fenomena menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengalami peningkatan. Peningkatan LKPD yang memperoleh opini WTP capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

Dari data hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017

memuat hasil pemeriksaan atas 537 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD Tahun 2016 yang wajib diserahkan. Terhadap 537 LKPD Tahun 2016 tersebut, BPK memberikan 375 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (70%), 139 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (26%), dan 23 opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (4%). Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 272 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). Berdasarkan fakta tersebut, maka diketahui masih terdapat permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015, LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat sebesar 12 poin persen dari 58% pada tahun 2015 menjadi 70% pada tahun 2016, seperti disajikan pada Gambar 1.1. Kenaikan opini WTP tersebut menunjukkan kenaikan kualitas LKPD.

**Gambar 1.1**  
**Perbandingan opini atas LKPD tahun 2015 dan tahun 2016**



Sumber: IHPS I Tahun 2017

## 2. LANDASAN TOERI

### 1.1 Sistem Pengendalian Intern

#### Pengertian Sistem

Menurut Mulyadi (2016:5) “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.”

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015: 1) Pengertian Sistem terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Sistem dilihat dari elemen-elemennya: kumpulan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.
2. Sistem dilihat dari masukan dan keluarannya: suatu rangkaian yang berfungsi menerima input (masukan), mengolah input, dan menghasilkan output (keluaran). Sistem yang baik akan mampu bertahan dalam lingkungannya.
3. Sistem dilihat dari prosedur/kegiatannya: suatu rangkaian prosedur/kegiatan yang dibuat untuk melaksanakan program perusahaan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem adalah suatu rangkaian atau kumpulan elemen-elemen, yang saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan demi mencapai tujuan tertentu.

#### Pengertian Pengendalian

Menurut Faiz Zamzami, dkk. (2016: 35) Pengendalian internal COSO merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dari sebuah entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam beberapa kategori:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi.
2. Keandalan laporan keuangan.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

#### Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”.

Menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1 (10) sebagai berikut: “Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah”.

Menurut Mulyadi (2016 : 129) “Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Menurut Mahmudi (2016:251) “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan menurut Faiz Zamzami, dkk (2016 : 35), Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dari sebuah entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam beberapa kategori:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi.
2. Keandalan laporan keuangan.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

## 1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas memiliki banyak makna bagi setiap orang sehingga pengertian kualitas dapat berbeda, hal tersebut disebabkan karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya.

Menurut Erlina Rasdianto (2013: 146), kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengembalian keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

### Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015: 88) “Laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan keuangan ini untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik”.

Menurut Indra Bastian (2010: 297) “Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik”.

Menurut Nordiawan, dkk. (2007: 305) “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan PPKD”.

### Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Seperti dijelaskan dalam Nordiawan, Iswahyudi, Maulidah (2007: 174) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Laporan keuangan SKPD juga dilampiri dengan laporan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) bentuk ringkas. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada gubernur/ bupati/walikota melalui pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah (BUD) menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampaikan kepada gubernur/bupati/walikota paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berdasarkan laporan keuangan SKPD serta laporan keuangan BUD. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah juga dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah yang disusun oleh gubernur/bupati/walikota selaku wakil

pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.

Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur/bupati/walikota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK serta koreksi lain berdasarkan SAP.

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit BPK, pejabat pengelola keuangan daerah menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Raperda tersebut disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Raperda yang telah disetujui bersama dengan DPRD, unyuk tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada menteri dalam negeri, dan untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur.

### 1.3 Kerangka Berpikir

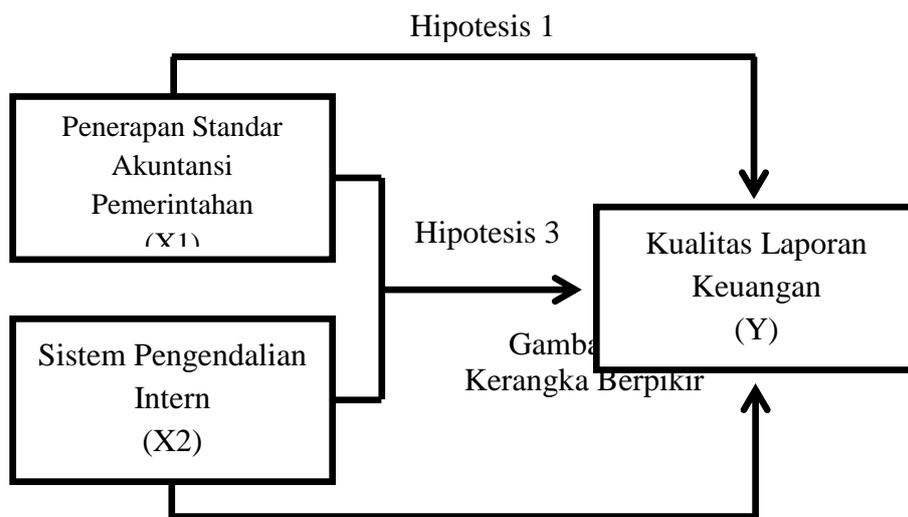
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

Berdasarkan PP No. 60/2008 Pasal 1 (1) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan

dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern akan menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja), sehingga pelaporan keuangan daerah dapat memenuhi nilai keterandalan karena Laporan Keuangan yang dihasilkan benar dan valid.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfe, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Adhi dan Suhardjo, 2013). Agar informasi akuntansi yang dihasilkan dapat digunakan dengan baik oleh pemakai, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdapat kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah berkualitas, yang terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan variabel bebas yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern. Kerangka Pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis adalah sebagai berikut:



Sumber: Penulis

### 1.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016 : 64), Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban yang empiris dengan data. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

#### Hipotesis 1

H<sub>0</sub>: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H<sub>a</sub>: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

#### Hipotesis 2

H<sub>0</sub>: Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H<sub>a</sub>: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

#### Hipotesis 3

H<sub>0</sub>: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H<sub>a</sub>: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2016: 2) metode penelitian dapat didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian itu

adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid.

Menurut Sugiyono (2016: 2), valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Oleh karena data yang telah terkumpul sebelum diketahui validitasnya, dapat diuji melalui reliabilitas dan obyektivitas. Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan tiap penelitian dapat berbeda karena bedanya masalah yang diteliti. Tujuan penelitian sangat besar pengaruhnya terhadap komponen-komponen penelitian lainnya, seperti metode, teknik, alat maupun generalisasi yang diperoleh. Ketajaman peneliti dalam merumuskan tujuan penelitian akan sangat mempengaruhi keberhasilan penelitian yang dilaksanakan, karena tujuan penelitian merupakan titik tolak dan tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.

1. Penemuan berarti bahwa data yang diperoleh dari penelitian tersebut merupakan data yang betul-betul baru atau belum pernah diteliti sebelumnya, dan sebelumnya belum pernah diketahui.
2. Pembuktian berarti bahwa data yang diperoleh tersebut digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu.
3. Pengembangan berarti bahwa untuk memperdalam dan mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei.

Menurut Indriantono dan Supomo (2009: 152) menyatakan definisi dari metode survei adalah sebagai berikut: “Metode survei adalah metode pengumpulan data primer yang diperoleh dari sumber asli (tidak melalui

media atau perantara). Data primer secara langsung dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini membutuhkan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan responden. Jadi metode survei merupakan metode yang mengumpulkan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif korelasional.”

Menurut Sugiyono (2016: 147) “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.

Menurut Umar (2011: 25) “Penelitian korelasional yaitu penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam satu populasi. Disini peneliti dapat mengetahui berapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya serta besarnya arah hubungan yang terjadi”.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN INTREPRETASI DATA

##### 4.1 Analisis Data

##### Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Statistik deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada nilai rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (*standar deviation*), nilai minimum dan maksimum dari seluruh variabel dalam penelitian ini yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Statistik Deskriptif**

Statistik Deskriptif					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Standar.Akuntansi.Pemerintahan	37	69	89	78,46	6,414
Sistem.Pengendalian.Intern	37	58	90	76,14	7,402
Kualitas.Laporan.Keuangan	37	45	60	51,84	5,075
Valid N (listwise)	37				

*Sumber : Data sekunder yang diolah melalui SPSS 24 (2018)*

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa  $n$  atau jumlah data pada setiap variabel yaitu 37. Masing-masing variabel akan dijabarkan sebagai berikut:

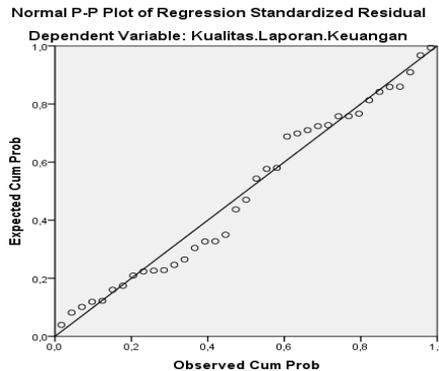
1. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai nilai *mean* 78,46 dan standar deviasi (*Std deviation*) sebesar 6,414 yang artinya bahwa nilai *mean* lebih besar daripada standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Nilai minimum sebesar 69 dan nilai maksimum sebesar 89.
2. Variabel Sistem Pengendalian Intern mempunyai nilai *mean* 76,14 dan standar deviasi (*Std deviation*) sebesar 7,402 yang artinya bahwa nilai *mean* lebih besar daripada standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Nilai minimum sebesar 58 dan nilai maksimum sebesar 90.
3. Variabel Kualitas Laporan Keuangan mempunyai nilai *mean* 51,84 dan standar deviasi (*Std deviation*) sebesar 5,075 yang artinya bahwa nilai *mean* lebih besar daripada standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. Nilai minimum sebesar 45 dan nilai maksimum sebesar 60.

#### 4.2 Uji Asumsi Klasik

##### A. Uji Normalitas

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji data residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki data residual yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Dua cara yang sering digunakan untuk menguji normalitas residual, yaitu dengan menggunakan grafik (normal P-P plot) regresi dan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. Model regresi memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya.

Gambar 4.1  
Uji Normalitas



Sumber : Data sekunder yang diolah melalui SPSS 24 (2018)

Berdasarkan hasil grafik normal P-Plot di atas, pola menunjukkan penyebaran titik-titik disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi

asumsi normalitas. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test.

Tabel 4.2  
Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		37
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,12295373
Most Extreme Differences	Absolute	,114
	Positive	,114
	Negative	-,098
Test Statistic		,114
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal
- b. Calculated from data
- c. Lilliefors Significance Correction
- d. This is a lower bound of the true significance

Sumber : Data sekunder yang diolah melalui SPSS 24 (2018)

Berdasarkan hasil tabel 4.8 di atas nilai dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah 0,114 dan signifikansi pada  $0,200 > 0,05$  maka dapat diinterpretasikan residual terdistribusi secara normal.

**B. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi hubungan yang kuat antara sesama variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya muktikolineritas di dalam model regresi dengan melihat nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor (VIF)* serta besaran korelasi antar variabel independen.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
1. (Constant)		
Standar.Akuntansi.Pemerintahan	,829	1,207
Sistem.Pengendalian.Intern	,829	1,207

a. Dependent Variable : Kualitas.Laporan.Keuangan

Sumber : Data sekunder yang diolah melalui SPSS 24 (2018)

Berdasarkan tabel 4.3, menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,829 dan Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,829 yang berarti dua variabel tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari 0,10. sedangkan nilai *Value Inflation Factor (VIF)* variable Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 1,207 dan Sistem Pengendalian Intern sebesar 1, yang berarti dua variabel tersebut memiliki nilai yang lebih kecil dari 10. Sehingga dengan demikian dapat diinterpretasikan bebas dari multikolinearitas atau tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

### C. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan *DW test*, yaitu dengan membandingkan nilai Durbin Watson hitung (d) dengan nilai Durbin Watson tabel yaitu batas lebih tinggi (*upper bond* atau *du*) dan batas lebih rendah (*lower bond* atau *dL*). Kriteria pengambilan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Jika  $DW < dL$  atau  $DW > 4 - dL$ , maka terdapat autokorelasi.
2. Jika  $dU < DW < 4 - dU$ , maka tidak terdapat autokorelasi.
3. Jika  $dL \leq DW \leq dU$  atau  $4 - dU \leq DW \leq 4 - dL$ , uji Durbin Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (*inconclusive*).

**Tabel 4.4**  
**Pengambilan Keputusan Autokorelasi**

Jika	Keputusan
$DW < dL$	terdapat autokorelasi positif
$DW > dU$	tidak terdapat autokorelasi positif
$dL < DW < dU$	tidak dapat disimpulkan
$(4 - DW) < dL$	terdapat autokorelasi negatif,
$(4 - DW) > dU$	tidak terdapat autokorelasi negative
$dL < (4 - DW) < dU$	tidak dapat disimpulkan.

Sumber: *statistician.com*

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Durbin-Watson**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,583 <sup>a</sup>	,340	,301	4,242	2,542

a. Predictors: (Constant), Standar.Akuntansi.Pemeintahan, Sistem.Pengendalian.Intern

b. Dependent Variable: Kualitas.Laporan.Keuangan

Sumber : Data sekunder yang diolah melalui SPSS 24 (2018)

Berdasarkan hasil di atas pada tabel 4.5 diketahui bahwa besarnya Durbin Watson (d) hitung sebesar 2,542 selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5% dengan jumlah sampel tiga puluh tujuh (37) dan jumlah variabel independen 2 ( $K=2$ ) = 37.2 (lihat pada Durbin Watson<sub>table</sub>) maka diperoleh nilai dL (batas bawah durbin watson) sebesar 1,3635 dan dU (batas atas

durbin watson) sebesar 1,5904, maka  $dU < DW < 4 - dU$  atau  $1,5904 < 2,542 < 4 - 1,5904$  atau 2,41 karena hasil perhitungan menunjukkan bahwa data masih berada pada posisi keragu-raguan, maka dilakukan *Run Test* untuk membuktikan bahwa data tidak terkena autokorelasi dengan syarat nilai *asyp. sig.* harus diatas 0,05. Hasil pada pengujiannya adalah:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Run Test**

	Unstandarized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,31840
Cases < Test Value	18
Cases >= Test Value	19
Total Cases	37
Number of Runs	22
Z	,672
Asymp. Sig. (2-tailed)	,502

a. Median

Sumber : Data sekunder yang diolah melalui SPSS 24 (2018)

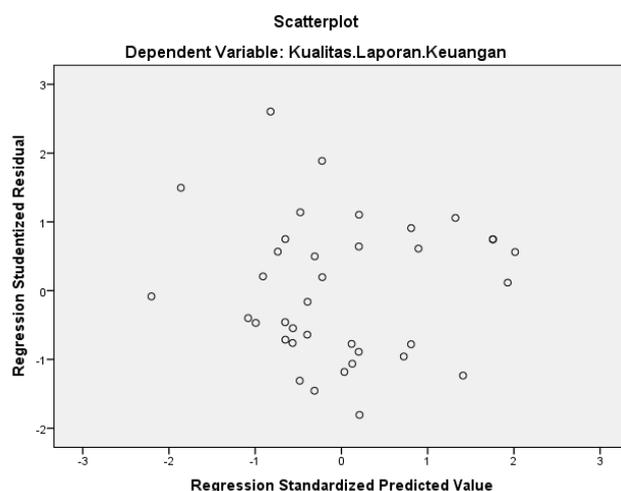
Berdasarkan hasil pada tabel 4.6 diketahui bahwa besarnya *Asymp. Sig* sebesar 0,502. Dengan demikian nilai *Asymp. Sig* diatas 0,05 sehingga menunjukkan bahwa model regresi tersebut terbebas dari autokorelasi.

#### D. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara pertama untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik Scatterplot. Titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, jika kondisi ini terpenuhi maka heteroskedastisitas tidak terjadi dan model regresi dapat digunakan. Hasil uji Heteroskedastisitas dengan grafik Scatterplot dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut:

**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas (Grafik Scatterplot)**



Sumber : Data sekunder yang diolah melalui SPSS 24 (2018)

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa variabel X dalam model ini merupakan homokedastisitas karena tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga diinterpretasikan pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

**E. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis mengenai

adanya pengaruh variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2) secara parsial maupun simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bantuan program SPSS 24.00. Dari hasil output SPSS maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta
	B	Std. Error	
1 (Constant)	12,531	9,578	
Standar.Akuntansi.Pemerintahan	,253	,121	,320
Sistem.Pengendalian.Intern	,255	,105	,372

a. Dependent Variable: Kualitas.Laporan.Keuangan

Sumber : Data sekunder yang diolah melalui SPSS 24 (2018)

$$Y = 12,531 + 0,252X1 + 0,255X2$$

Keterangan:

X1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

X2 : Sistem Pengendalian Intern

Y : Kualitas Laporan Keuangan

Persamaan regresi diatas memiliki arti yaitu:

1. Nilai kostanta (a) sebesar 12,531 menunjukkan bahwa apabila variabel

independen bernilai 0 (tetap atau tidak ada perubahan), maka Kualitas Laporan Keuangan akan naik adalah sebesar 12,531 persen.

2. Koefisien regresi atau nilai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,253. Besarnya koefisien adalah 0,253 yang berarti menunjukkan arah hubungan positif antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan. Tanda positif menunjukkan pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan searah terhadap Kualitas Laporan Keuangan, menunjukkan bahwa setiap peningkatan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 1 persen, maka akan diikuti oleh peningkatan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 25,3 persen dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi atau nilai Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,255. Besarnya koefisien adalah 0,255 yang

berarti menunjukkan pengaruh Sistem Pengendalian Intern positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Tanda positif menunjukkan pengaruh Sistem Pengendalian Intern searah terhadap Kualitas Laporan Keuangan, menunjukkan bahwa setiap peningkatan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 1 persen, maka akan diikuti oleh peningkatan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 25,5 persen dengan asumsi variabel lain tetap.

### 4.3 Uji Hipotesis

#### A. Uji t

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern) secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Kualitas Laporan Keuangan). Hasil uji t adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	12,531	9,578		1,308	,200
Standar.Akuntansi.Pemerintahan	,253	,121	,320	2,091	,044
Sistem.Pengendalian.Intern	,255	,105	,372	2,433	,020

a. Dependent Variable: Kualitas.Laporan.Keuangan

Sumber : Data sekunder yang diolah melalui SPSS 24 (2018)

Dari tabel 4.8 nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah 2,091. Nilai  $t_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel statistik pada uji signifikansi  $0,05/2=0,025$  (uji 2 sisi) dengan rumus derajat bebas atau *degree of freedom* (df), yaitu  $df= n- k$  atau  $37-2 = 35$  (k adalah banyaknya variabel independen dan n adalah banyaknya sampel) didapat nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,03011

#### B. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Hasil dari uji f adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	315,072	2	157,536	8,753	,001 <sup>b</sup>
Residual	611,955	34	17,999		
Total	927,027	36			

- a. Dependent Variabel : Kualitas.Laporan.Keuangan
- b. Predictors : (Constant), Sistem.Pengendalian.Intern,
- c. Standar.Akuntansi.Pemerintahan

Sumber : Data sekunder yang diolah melalui SPSS 24 (2018)

Dari tabel 4.9 didapat nilai  $F_{hitung}$  sebesar 8,753 dengan taraf signifikansi 0,001 (tingkat signifikan  $\alpha$  0,05). Sedangkan nilai  $F_{tabel}$  di dapat dari tabel statistik pada signifikansi 0,05; dengan rumus derajat bebas atau *degree of freedom* (df), yaitu  $df_1 = k-1$  atau  $3-1 = 2$ ;  $df_2 = n-k$  atau  $37-3 = 34$  (k adalah jumlah variabel bebas dan terikat, n adalah jumlah sampel) didapat nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,28.

**C. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas yang memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi untuk dua varibel bebas digunakan R Square, sebagai berikut:

**Tabel 4.10**

**Hasil Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,583 <sup>a</sup>	,340	,301	4,242

- a. Predictors : (Constant), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern
- b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data sekunder yang diolah melalui SPSS 24 (2018)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa besarnya nilai R Square adalah 0,340 yang menunjukkan bahwa secara simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan sebesar 34% sedangkan sisanya sebesar 66% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Salah satu faktor lain yang sangat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan diluar penelitian ini adalah teknologi informasi. Dengan penggunaan teknologi informasi telah memberikan peluang pemanfaatan kepada berbagai pihak untuk mendayagunakan, mengelola, mengakses informasi keuangan

secara efektif, efisien, akurat, andal dan tepat waktu (Liza Mutiana, dkk, 2017).

**4.4 Interpretasi Hasil Analisis Data**

**1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Sistem Pengendalian Intern mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,091. Sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,030. Hal ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  jauh lebih besar dari  $t_{tabel}$  atau  $2,091 > 2,030$ , dengan besarnya taraf kesalahan 5% ( $\alpha=0,05$ ) dan memiliki tingkat signifikansi (P-value)

yaitu sebesar 0,001 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang dikehendaki  $\alpha=0,05$  maka dalam hal ini  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil ini sesuai dengan teori dari Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2017) yang menyatakan bahwa dampak positif dari penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual berhasil meningkatkan pelaporan keuangan selain itu juga mempermudah para pemakai dalam melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintah dalam pencapaian kinerja pemerintah.

## 2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Sistem Pengendalian Intern mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,433. Sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,030. Hal ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  jauh lebih besar dari  $t_{tabel}$  atau  $2,433 > 2,030$ , dengan besarnya taraf kesalahan 5% ( $\alpha=0,05$ ) dan memiliki tingkat signifikansi (P-value) yaitu sebesar 0,029 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang dikehendaki  $\alpha=0,05$  maka dalam hal ini  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya bahwa Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil ini sesuai dengan teori dari Faiz Zamzami, dkk (2016) bahwa penyusunan laporan keuangan yang andal, akurat, dan tepat waktu memerlukan penerapan pengendalian internal. Hasil ini juga sesuai dengan teori TMbooks (2015) yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Sistem Pengendalian Intern meliputi reliabilitas pelaporan keuangan.

## 3. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji F menunjukkan bahwa hasil nilai  $F_{hitung}$  sebesar 8,753 dengan taraf

signifikansi 0,001 (tingkat signifikan  $\alpha$  0,05). Sedangkan nilai  $F_{tabel}$  di dapat dari tabel statistik pada signifikansi 0,05 dengan rumus derajat bebas atau *degree of freedom* (df), yaitu  $df1 = k-1$  atau  $3-1 = 2$ ;  $df2 = n-k$  atau  $37-3=34$  (k adalah jumlah variabel bebas dan terikat, n adalah jumlah sampel) didapat nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,28. Jika :

- 1)  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dan  $Sig. > \alpha$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
- 2)  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan  $Sig. < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $8,753 > 3,28$ ) dan  $sig. < \alpha$  ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

## 5. PENUTUP

### 1.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap hipotesa yang telah di uji menggunakan regresi berganda, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah memiliki struktur organisasi dan tugas yang jelas. Sehingga Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

2. Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah menerapkan aturan-aturan mengenai pengendalian dan wewenang atau tanggungjawab secara sistem dapat meningkatkan efektifitas dan ketelitian selama proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008.
3. Dari hasil uji F menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Hal menunjukkan adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern yang baik akan mempengaruhi laporan keuangan yang berkualitas.

## 1.2 Saran

Dari hasil penelitian pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, di harapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan. Maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sebaiknya laporan keuangan disajikan secara transparansi atau memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah dan ketaatan pemerintah

pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah perlu memastikan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah harus melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas sistem pengendalian internnya masing-masing untuk mengetahui kinerja dan efektifitas sistem pengendalian intern serta cara meningkatkannya. salah satu caranya dengan memberikan pelatihan dan bimbingan kerja untuk membantu pegawai dalam mewujudkan salah satu tujuan sistem pengendalian intern yaitu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.
3. Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan untuk memperbanyak sampel penelitian dan variabel independen, sehingga hasil penelitian dapat mengungkap secara lebih akurat besar pengaruh variabel independen tersebut mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah seperti teknologi informasi. Dan untuk penelitian selanjutnya perlu menambahkan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2017. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*. Dapat diakses di: <http://www.bpk.go.id/ihps>. Diunduh tanggal 16 November 2017, 13:42:10.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2017. *Laporan*

- Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016*. Dapat diakses di: <http://www.bpk.go.id/ihps>. Diunduh tanggal 16 November 2017, 17:05:10.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dwi Martani, Sylvia Veronica Nps, Ratna Wardhani, Aria Farahmita dan Edward Tanujaya. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Erlina dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Gelinas, Ulrich dan Dull, B. Richard. 2012. *Accounting Information Systems, Edisi 9*. South Western: Cengage Learning.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Kelima. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasanah, Nuramalia dan Achmad Fauzi. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media
- Indriantoro, Nur. Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Indriasari, D dan Nahartyo, E. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak. Juli.
- James M Reeves, Carls S. Warren & Jonathan E. Duchac. 2013. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kota Bekasi. 2016. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.
- Kusaeri dan Supranato. 2012. *Pengukuran Dan Penilaian Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mahsun et al, 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ke-4. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pura, Rahman. 2013. *Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sadeli, Lili M. 2015. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi 9. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sanjaya, Aditya. 2017. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar)*. Jurnal Universitas Riau.

- Setiawan, I Wayan Nico dan Gayatari. 2017. *Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sutrisno. 2012. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2012. *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*. Bandung: Alfabeta
- TMBooks. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi Konsep dan Penerapan*. Edisi 1. Yogyakarta: ANDI.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Press.
- Zamzami, Faiz. Nabella Duta Nusa, dan Ihda Arifin Faiz. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UGM Press.